



Ekonomi Mulai Merangkak

JOGJA—Ekonomi di DIY mulai merangkak senyampang adanya pelonggaran-pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Abdul Hamid Razak, Herlambang Jati Kusumo, & Sugeng Pranyoto
redaksi@harianjogja.com

Bank Indonesia (BI) DIY menilai pada September atau selama pelonggaran PPKM ke level 3, aktivitas kegiatan ekonomi mulai berjalan.

"Wisatawan sudah mulai ramai. Akhir pekan okupansi hotel juga mulai penuh. Artinya ada pergerakan ekonomi. [Ada] *multiplier effect* dari wisatawan," ucap Deputy Kepala BI DIY, Miyono, Selasa (5/10).

Miyono mengungkapkan meski aktivitas ekonomi mulai berjalan, tetapi selama September *outflow* atau uang yang keluar dari BI DIY masih lebih sedikit dari *inflow* atau uang yang masuk di BI. Untuk *outflow* uang kartal keluar sebesar Rp338 miliar, sementara *inflow* sebesar Rp799 miliar. "Namun bukan begitu saja perputaran uang yang beredar. Kami juga mendorong antarpribank dengan Tukab atau Transaksi Uang Kartal Antar Bank. Misal Bank X kelebihan Rp1 miliar, sementara Bank Y kurang Rp500 juta, bisa ambil kelebihan itu. Daripada harus lewat BI dulu. Itu nilai Tukab pada September Rp2,3 triliun," ujar Miyono.

Miyono mengungkapkan besaran angka-angka tersebut tidak menunjukkan uang yang beredar seluruhnya di DIY. Sebab, hal tersebut tidak bisa dihitung untuk skala regional. "Artinya uang yang beredar tidak hanya itu," ucapnya.

Ia memperkirakan perputaran uang juga akan terus meningkat

▶ Bank Indonesia menilai pada September aktivitas kegiatan ekonomi mulai berjalan ke arah positif, merangkak naik.

▶ Sekda DIY meyakini Bumi Mataram sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk turun level.

pada Triwulan IV, meski hingga saat ini DIY masih PPKM level 3. "Di triwulan IV ada momentum Natal dan Tahun Baru. Saat ini juga wisata mulai dibuka pelan-pelan, ekonomi bergerak. Terpenting bagaimana menjaga proses dan mengejar vaksinasi," ucapnya.

Kepala Dinas Pariwisata Sleman, Suparmono, mengatakan tingkat kunjungan wisatawan meningkat pada akhir pekan lalu. Meskipun jumlahnya diyakini belum mencapai ribuan orang, kunjungan wisatawan mampu meningkatkan tingkat hunian hotel.

"Saya sempat kaget ada hotel yang menyampaikan okupansinya akhir pekan lalu mencapai 95 persen. Ini kan luar biasa dan kami tidak bisa melarang wisatawan datang," katanya, Selasa.

Diakui, selain destinasi wisata, hotel, restoran, pusat perbelanjaan, dan wisata kuliner lainnya sudah mulai padat dikunjungi. Untuk membatasi kunjungan, pemerintah menerapkan aturan dengan mewajibkan pengunjung skrining dengan aplikasi *Peduli Lindungi*. Termasuk menerapkan kebijakan ganjil genap di destinasi wisata yang diizinkan beroperasi.

Menurut Suparmono, sejauh ini penerapan protokol kesehatan di destinasi wisata sudah baik. Ia mengecek sendiri ke tiga destinasi yang diizinkan mulai Ratu Boko, Tebing Breksi dan Merapi Park.



Ekonomi Mulai...

"Aturan [betul-betul] diterapkan di tiga destinasi tersebut. Misalnya ada yang bawa anak usia di bawah 12 tahun, tidak diizinkan masuk," katanya.

Hingga kini, lanjut Suparmono, Dispar masih menunggu penambahan jumlah destinasi yang diizinkan Kemenparekraf. Dispar sudah mengajukan 15 destinasi yang dinilai sudah memenuhi syarat, terdiri dari desa wisata hingga wisata alam.

Ketua PHRI Sleman, Joko Paromo, mengakui okupansi pada akhir pekan lalu sudah mencapai antara 80%-95%. "Seluruh anggota PHRI tetap menerapkan protokol kesehatan, kami juga menjalankan aplikasi *Peduli Lindungi* kepada pengunjung," katanya.

Turun Level

Sementara itu, Pemda DIY akan menanyakan langsung ke Pemerintah Pusat terkait status Bumi Mataram yang belum turun level dalam PPKM.

Pemerintah resmi memperpanjang PPKM di Jawa dan Bali hingga 18 Oktober mendatang. Dalam pengumuman yang disampaikan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan tersebut, DIY menjadi salah satu wilayah aglomerasi yang belum turun level dari 3 ke 2. Sedangkan wilayah aglomerasi sekitar DIY seperti Soloraya dan Semarang sudah turun.

"Nanti kalau sudah diundang

Pak Luhut [Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan] saya mau tanyakan kenapa kita tidak turun [level PPKM], supaya nanti kita bisa tindak lanjuti ya," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarman Baskara Aji, Selasa.

Baskara meyakini DIY sudah memenuhi syarat untuk turun level jika dilihat dari berbagai persyaratan, seperti *positivity rate* yang sudah bagus, jumlah kasus baru positif menurun terus bahkan sudah di bawah angka 50 kasus, dan jumlah kasus meninggal juga terus menurun.

Selain itu, tingkat keterisian tempat tidur/*bed occupancy rate* (BOR) di rumah sakit sudah bagus, demikian pula cakupan vaksinasi sudah mencapai di atas 80%. "Nanti kami tanyakan kenapa [belum turun level]. Apakah jumlah *tracing* yang belum memenuhi?" ujar Baskara Aji.

Menurut Baskara Aji, *tracing* yang dilakukan Pemda DIY mengacu pada kontak kasus positif Covid-19 sehingga tidak sembarangan orang dites agar data Covid-19 valid.

Menurut Baskara Aji, tidak ada perubahan aturan yang akan dituangkan dalam Instruksi Gubernur DIY pada perpanjangan PPKM level 3 ini. Misalnya pembelajaran tatap muka (PTM) dibolehkan dengan terbatas, industri dan pariwisata juga masih sama atau belum ada

penambahan objek wisata yang dibolehkan melakukan uji coba pembukaan.

"Saya baca [Instruksi Menteri Dalam Negeri terkait Perpanjangan PPKM Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1] teliti kayaknya sama dengan kemarin misalnya anak 12 tahun baru boleh [masuk mal] di kota, yang lain-lain sama dengan kemarin," ujar Baskara Aji.

Kepala Dinas Kesehatan DIY, Pembajun Setyaningastutie, mengatakan kondisi Covid-19 di DIY sudah membaik, dan semakin terkendali. Dinkes belum mengetahui pasti PPKM DIY belum turun level meski dalam kondisi baik.

Pembajun mengatakan kemungkinan masih ada kabupaten yang belum mencapai target vaksin sampai 80% atau belum mencapai *herd immunity* atau kekebalan komunal.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Jogja, Heroe Poerwadi, mengaku tidak mempersoalkan Kota Jogja masih dalam PPKM level 3.

Dengan posisi PPKM level 3, kata Heroe, memberikan peringatan bahwa masyarakat harus berhati-hati.

Level 3 artinya protokol kesehatan masih harus ketat, jangan sampai PPKM level 2 warga nantinya merasa bebas. "Jangan sampai lepas kendali tiba-tiba tutup lagi mulai dari nol lagi, membutuhkan energi besar," kata Heroe. (Ujang Hasanudin)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Perekonomian Pengemb. P	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005